

**IMPLEMENTASI E-GOVERNANCE BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI
MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PUBLIK DI SUBBAGIAN KEUANGAN**

Ni Putu Ayu Prayascitta Swari Dewi¹, Ni Putu Anik Prabawati²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Udayana

Email : Pryscitta27@gmail.com¹, prabawati@unud.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi e-government sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu bentuk implementasi e-government di Indonesia adalah penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai sistem informasi keuangan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government melalui penggunaan aplikasi SAKTI serta perannya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik pada Subbagian Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara dengan pegawai bidang keuangan, serta analisis dokumen proses pengelolaan keuangan yang dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKTI telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta didukung oleh kebijakan internal organisasi. SAKTI dimanfaatkan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan belanja melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP), penyusunan laporan keuangan, serta proses rekonsiliasi dengan sistem OMSPAN. Pembagian peran, pembatasan hak akses, serta ketersediaan jejak audit dalam sistem memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas administratif. Secara keseluruhan, penggunaan SAKTI meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, sehingga menunjukkan perannya sebagai instrumen e-government yang efektif dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik di lingkungan lembaga negara. Kata kunci: e-governance, SAKTI, akuntabilitas publik, pengelolaan keuangan, BPK RI.

Abstract

The development of information technology has encouraged governments to adopt e-government as a strategy to improve the quality of public governance, particularly in public financial management. One form of e-government implementation in Indonesia is the use of the Agency-Level Financial Application System (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI), developed by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia as an integrated financial information system. This study aims to analyze the implementation of e-government through the use of the SAKTI application and its role in enhancing public

financial accountability at the Finance Subdivision of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) Representative Office of Bali Province. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through participatory observation during an internship program, interviews with finance officers, and document analysis of financial management processes conducted using the SAKTI application. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of SAKTI has been conducted in accordance with standard operating procedures and technical guidelines established by the Ministry of Finance and supported by internal organizational policies. SAKTI is utilized throughout the entire financial management cycle, including planning and budgeting, expenditure execution through direct payment (LS) and imprest fund (UP) mechanisms, financial reporting, and reconciliation with the OMSPAN system. The division of roles, access control mechanisms, and audit trail features embedded in the system strengthen internal control and administrative accountability. Overall, the use of SAKTI enhances efficiency, transparency, and accountability in public financial management, demonstrating its role as an effective e-government instrument in supporting sound financial governance within state institutions.

Keywords: e-governance, SAKTI, public accountability, public financial management, BPK RI.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi konsep e-governance sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. E-governance dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memperbaiki proses administrasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi. *E-governance* tidak hanya berperan dalam digitalisasi layanan publik tetapi juga dalam penguatan akuntabilitas melalui sistem informasi yang terintegrasi dan otomatis (Prabowo, 2017). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, penerapan e-governance diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Salah satu bentuk implementasi e-governance dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI merupakan sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bagian dari reformasi sistem perbendaharaan dan penganggaran negara. SAKTI dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara dalam satu basis data, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan (Hariyani et al., 2024).

SAKTI digunakan secara wajib oleh seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga pemerintah pusat, termasuk lembaga negara non-kementerian, sebagai pengganti berbagai

aplikasi keuangan sebelumnya yang bersifat terpisah. Penerapan SAKTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi keuangan, mengurangi duplikasi data, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, akurat, dan tepat waktu. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, SAKTI juga dilengkapi dengan mekanisme validasi otomatis, pembatasan hak akses, serta audit trail yang mendukung pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SAKTI berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan publik. Menuut studi yang dilakukan oleh (Fernanda, 2024) pada Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyatakan bahwa penggunaan SAKTI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi keuangan karena proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara terintegrasi. Penelitian lain oleh (Qurratu'Aini et al., 2025) menemukan bahwa SAKTI berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia dan kendala teknis sistem.

Dalam perspektif *e-governance*, penerapan SAKTI mencerminkan upaya pemerintah dalam melakukan modernisasi administrasi publik melalui digitalisasi sistem keuangan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dalam konteks akuntabilitas publik, sistem informasi keuangan yang terintegrasi seperti SAKTI mendukung mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat karena menyediakan data yang terdokumentasi secara digital, dapat ditelusuri, dan mudah diaudit oleh auditor internal maupun eksternal fitur yang telah terbukti meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan keuangan sektor publik (Utami et al., 2025).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga menerapkan SAKTI dalam pengelolaan keuangan internalnya. Di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, penggunaan SAKTI pada Subbagian Keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *e-governance* melalui SAKTI di lingkungan internal BPK RI, khususnya pada tingkat perwakilan daerah, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-governance* melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di BPK RI

Perwakilan Provinsi Bali serta mengkaji perannya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Subbagian Keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian e-governance dan akuntabilitas publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi penguatan tata kelola keuangan di lingkungan lembaga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi e-government melalui penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta perannya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penelitian dilaksanakan pada Subbagian Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali dengan subjek penelitian yang ditentukan secara purposive, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi SAKTI, meliputi pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, staf penganggaran, dan penyusun laporan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, serta studi dokumentasi terhadap dokumen pengelolaan keuangan, standar operasional prosedur, dan laporan keuangan yang diproses melalui aplikasi SAKTI. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan proses implementasi SAKTI serta keterkaitannya dengan prinsip e-government dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka SOP dan Tata Kelola Penggunaan Aplikasi SAKTI

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang bersumber dari Kementerian Keuangan serta arahan struktural pimpinan internal. SOP dan juknis tersebut disusun mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan negara dan pedoman teknis penggunaan SAKTI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

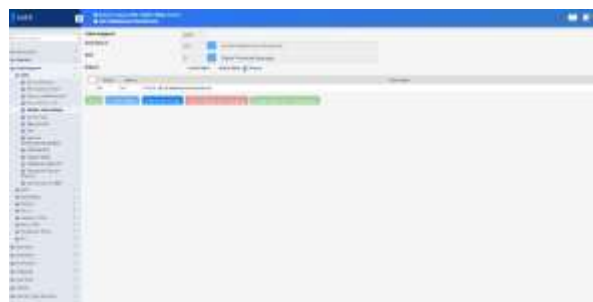
Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Keberadaan SOP berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjamin keseragaman proses, kepastian prosedur, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana disampaikan oleh informan, *“penggunaan aplikasi SAKTI sudah mengikuti SOP dari kementerian dan arahan internal, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas, tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SAKTI tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga melekat pada kerangka tata kelola yang terstandar dan terdokumentasi. SOP menjadi instrumen pengendalian administratif yang mengarahkan setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, agar selaras dengan regulasi nasional.

Dalam perspektif e-governance, keberadaan SOP dan juknis SAKTI mencerminkan prinsip *rule-based governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang menekankan kepatuhan terhadap aturan formal, prosedur baku, dan mekanisme kontrol yang jelas (Jimi & Suherman, 2025). Pemanfaatan teknologi informasi melalui SAKTI memperkuat penerapan prinsip tersebut dengan membatasi ruang diskresi individu, karena setiap transaksi dan proses keuangan harus mengikuti alur sistem yang telah ditetapkan secara digital. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penguat kepatuhan dan konsistensi kebijakan.

Peran Aktor dan Pembagian Tugas dalam Sistem SAKTI

Aplikasi SAKTI digunakan oleh berbagai aktor dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan keuangan di Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Aktor-aktor tersebut meliputi staf penganggaran, staf PPK layanan sekretariat, staf PPK operasional, bendahara pengeluaran, serta penyusun laporan keuangan. Masing-masing aktor memiliki fungsi dan kewenangan yang spesifik sesuai dengan perannya dalam siklus pengelolaan keuangan.



Gambar 1. Tampilan aplikasi SAKTI

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan, yaitu *“Di Subbagian Keuangan terdapat beberapa peran, antara lain staf penganggaran, staf PPK layanan sekretariat, staf PPK operasional, penyusun laporan keuangan, serta bendahara pengeluaran. Setiap pengguna memiliki peran dan menu yang berbeda dalam aplikasi SAKTI, sehingga tidak semua pihak dapat melakukan validasi atau persetujuan.”*

Pembagian peran dan pembatasan hak akses tersebut menunjukkan bahwa SAKTI berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang membangun pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya pemisahan tugas dan jejak audit yang terdokumentasi dalam sistem, risiko kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas administratif dalam pengelolaan keuangan publik.

Modul Administrasi dan Penganggaran

Modul Administrasi dan Modul Penganggaran dalam Aplikasi SAKTI digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan pada tingkat satuan kerja. Modul ini memuat data dasar instansi, struktur organisasi, pejabat perbendaharaan, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan. Di Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, modul ini berfungsi sebagai referensi utama sebelum pelaksanaan anggaran dilakukan. Informan menjelaskan bahwa proses pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan anggaran yang dilakukan secara jangka menengah. Perencanaan telah disusun jauh sebelum tahun pelaksanaan anggaran melalui mekanisme proyeksi, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga penetapan DIPA. *“Perencanaan anggaran sudah dimulai sejak dua tahun sebelumnya, diawali dengan proyeksi anggaran, kemudian disusun RKA pada Termin I, hingga akhirnya DIPA terbit sekitar bulan November sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.”* (Informan)

Penggunaan modul penganggaran mempermudah pegawai dalam melakukan penyesuaian dan pemantauan pagu anggaran secara real time. Dalam pelaksanaannya, anggaran bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan melalui mekanisme revisi. Informan mengungkapkan bahwa revisi anggaran dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangan, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga Direktorat Jenderal Anggaran. Setiap perubahan anggaran tercatat secara digital dan tervalidasi dalam sistem, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi akibat ketidaksesuaian data. Hal ini memberikan kemudahan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan dan belanja yang diajukan telah sesuai dengan alokasi

anggaran yang tersedia.

Modul Bendahara, dan Pembayaran

Modul Bendahara, dan Pembayaran merupakan bagian inti dalam pengelolaan administrasi keuangan. Modul ini digunakan dalam proses pengajuan pembayaran, serta pengelolaan uang persediaan melalui mekanisme Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Dalam praktiknya, pegawai Subbagian Keuangan memanfaatkan modul ini untuk menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) secara elektronik berdasarkan dokumen pendukung yang telah diverifikasi. Sistem secara otomatis melakukan pengecekan kesesuaian data, seperti ketersediaan pagu, akun belanja, serta kelengkapan administrasi. Apabila terjadi ketidaksesuaian, sistem akan memberikan peringatan (warning) sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki sebelum proses dilanjutkan. Keunggulan utama dari modul ini adalah kemampuannya mempercepat proses administrasi pembayaran. Proses yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen fisik kini dapat dilakukan secara digital, sehingga mengurangi waktu pemrosesan, biaya operasional, serta risiko kehilangan dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan dan pencairan anggaran pada Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme langsung (*langsung bayar/LS*) dan mekanisme Uang Persediaan (UP). Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik, prosedur, dan batasan penggunaan yang berbeda sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan, yaitu *“Terkait pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, secara prinsip terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP). Mekanisme UP merupakan dana yang dikelola oleh bendahara dan hanya dapat digunakan untuk belanja barang dan belanja modal, sedangkan belanja pegawai tidak dapat menggunakan mekanisme UP. Sementara itu, mekanisme LS dapat digunakan untuk seluruh jenis belanja.”*

Informan menjelaskan bahwa mekanisme LS dilaksanakan melalui proses verifikasi berjenjang, dimulai dari pemeriksaan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bantuan staf PPK, dilanjutkan dengan penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPSPM dan pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sementara itu, mekanisme UP bersifat *revolving*, di mana dana dikelola langsung oleh bendahara pengeluaran dan dapat diajukan penggantian setelah sebagian dana digunakan.

Sebagaimana disampaikan informan, yaitu *“Untuk mekanisme UP, dokumen diverifikasi oleh staf PPK terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sesuai, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendahara melakukan pembayaran. UP sifatnya berputar, sehingga penggantian bisa diajukan setelah minimal lima puluh persen dana digunakan.”*

Keberadaan dua mekanisme ini, yang seluruh prosesnya direkam dan dikendalikan melalui aplikasi SAKTI, menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan. Setiap transaksi LS maupun UP meninggalkan jejak digital (*audit trail*) yang dapat ditelusuri, sehingga memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Proses Rekonsiliasi

Dalam penyusunan laporan keuangan, informan menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dilakukan secara periodik, meliputi laporan Semester I, laporan Triwulan III, serta laporan Tahunan Audited. Proses pelaporan tersebut didukung dengan mekanisme tutup buku bulanan dan rekonsiliasi data antara aplikasi SAKTI dan OMSPAN untuk menjamin konsistensi dan keandalan informasi keuangan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan, yaitu *“Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga periode pelaporan, yaitu laporan Semester I, laporan Triwulan III, dan laporan Tahunan Audited. Selain itu, setiap bulan juga dilakukan tutup buku atas transaksi bulan sebelumnya. Setelah proses tutup buku, dihasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) antara aplikasi SAKTI dan OMSPAN. Apabila terdapat transaksi yang belum tercatat secara otomatis dalam sistem, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual.”*

Keberadaan proses rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada pencatatan otomatis, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme pengendalian akuntansi untuk memastikan keakuratan data. Seluruh tahapan pelaporan dan rekonsiliasi yang terdokumentasi dalam SAKTI memperkuat akuntabilitas keuangan karena setiap selisih dan koreksi dapat ditelusuri secara jelas melalui jejak audit sistem.

Dampak SAKTI terhadap Efisiensi dan Kualitas Administrasi Keuangan

Secara keseluruhan, informan menilai bahwa penggunaan aplikasi SAKTI memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Digitalisasi proses melalui sistem terintegrasi menjadikan pengelolaan keuangan lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri dibandingkan dengan mekanisme manual. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh

informan, yaitu *“Secara keseluruhan, penggunaan aplikasi SAKTI memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi waktu dan biaya dalam pengelolaan keuangan, karena proses menjadi lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.”*

Selain meningkatkan efisiensi, SAKTI juga dinilai mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan transaksi yang sistematis dan tersedianya jejak audit. Informan menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan terekam dalam sistem dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan maupun evaluasi. *“Setiap tahapan pengelolaan keuangan dilakukan melalui modul yang berbeda dalam SAKTI, sehingga seluruh transaksi terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali.”*

Keberadaan dokumentasi digital dan *audit trail* ini memperkuat mekanisme pertanggungjawaban keuangan, karena setiap transaksi memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat diaudit. Dengan demikian, penggunaan SAKTI tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas administratif dan keuangan dalam pengelolaan keuangan publik. Dari perspektif administrasi publik, SAKTI berfungsi sebagai instrumen pendukung reformasi birokrasi melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini mendorong terciptanya tata kelola

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Subbagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali merupakan bentuk nyata penerapan e-governance dalam pengelolaan keuangan publik. Pemanfaatan SAKTI telah dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten dengan standar operasional prosedur serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan diperkuat oleh arahan pimpinan internal. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam kerangka tata kelola berbasis aturan (*rule-based governance*).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SAKTI digunakan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran melalui mekanisme langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP), hingga penyusunan laporan keuangan dan proses rekonsiliasi dengan OMSPAN. Integrasi antar modul, mekanisme validasi otomatis, pembatasan hak akses, serta keberadaan *audit trail* memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, SAKTI berfungsi tidak hanya sebagai alat

administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan akuntabilitas keuangan.

Dari perspektif e-governance, penerapan SAKTI mencerminkan modernisasi administrasi publik melalui digitalisasi sistem keuangan yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Sementara itu, dari sudut pandang akuntabilitas publik, SAKTI mendukung mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat karena seluruh transaksi dan proses keuangan terdokumentasi secara digital, dapat ditelusuri, dan mudah diaudit. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa sistem informasi keuangan terintegrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SAKTI di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, keberlanjutan dan optimalisasi manfaat SAKTI tetap memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang andal, serta evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai e-governance dan akuntabilitas publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi penguatan tata kelola keuangan di lingkungan lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda, A. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (Sakti) Untuk Penganggaran Yang Efektif Di Kejaksaan Lampung Tengah. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5052–5065.
- Hariani, R., Ahmad, A. W., & Fontanella, A. (2024). Integrasi Pengelolaan Keuangan Dan Laporan Pertanggungjawaban Melalui Aplikasi Sakti (Studi Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sumatera Barat). *Journal Of Applied Accounting And Business*, 6(1), 8–19.
- Jimi, J., & Suherman, U. (2025). Peran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Intansi (SAKTI) Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Karawang. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(4), 11–20.
- Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 55–66.
- Qurratu‘Aini, F., Paramita, I., Patricia, A., & Mustafidah, A. A. (2025). Implementasi Aplikasi Sakti Sebagai Upaya Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di

Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 223–229.

Utami, A. S., Ajiman, G. S., Turnip, C., Irfan, M., & Hanoselina, Y. (2025). Pemanfaatan Aplikasi Sakti (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18447–18461.